

# RENCANA KERJA TAHUN 2022

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK



USER  
[Type the company name]  
[Pick the date]





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2022 disusun.

Sebagaimana Rencana Kerja tahun – tahun yang lalu, Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 ini juga masih menyimpan banyak kekurangan. Oleh karena itu, walaupun rencana yang Kami susun dalam buku ini belum seluruhnya memenuhi keinginan atau kebutuhan sebagaimana yang diharapkan, namun dapat menjadi panduan dan bermanfaat khususnya bagi para pengelola dan pelaksana program di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, serta mitra terkait di luar sektor Instansi dan siapa saja yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap program-program DP2KBP3A termasuk masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat.

Akhirnya, terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses penyusunan Buku Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 ini hingga selesai.

Pontianak, April 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Pontianak,



**Drg. Multi Juto Bhatarendro, MPPM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640114 198812 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika .....	8
<b>BAB II EVALUASI RENJA DP2KBP3A.....</b>	<b>9</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan .....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	26
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	46
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	50
3.3. Program dan Kegiatan .....	51
<b>BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PD</b>	<b>81</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>102</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak disusun berdasarkan Kota Pontianak, Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak, serta berpedoman pada Renja dan Lembaga terkait urusan yang diemban oleh (DP2KBP3A) Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renja DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada Renstra (DP2KBP3A) Kota Pontianak

2020-2024 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan Kota Pontianak yang berpedoman pada RPJMD 2020-2024. Sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kota Pontianak serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2020-2024 yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
  8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  20. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;



21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025

- (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
29. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 (Nomor 49).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **2. Tujuan**

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Instansi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Renja OPD tahun lalu (tahun 2020).

Renja 2020 merupakan tahun pertama dari periode RPJM 2020 – 2024, yang masih menggunakan indikator dan nomenklatur yang belum dimutakhirkan sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019. Untuk itu, capaian renja pada tahun 2020 akan memiliki perbedaan nomenklatur dan sebagian indikator kinerjanya dengan usulan Renja 2022, dikarenakan Renja pada periode 2021 dan 2022 telah mengikuti perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019.

Review pada Renja n-2 (2020) melihat pada capaian kinerja *outcome* dan *output* kegiatan yang sudah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020 dan kemudian diperbaharui melalui perjanjian kinerja perubahan tahun 2020, capain indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel dibawah :

Untuk setiap sasaran Pemerintah Kota Pontianak yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  
s/d Tahun 2020 Kota Pontianak**

**OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak**  
**Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.02.2.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan ATK, dan Keperluan Kantor Lainnya	100%		100%	75%	75		75%	75%
2.02.2.02.01.00.01.001	Gaji dan Tunjangan PNS	Terpenuhinya gaji dan tunjangan PNS	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.004	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	60		12	9	75		9	15%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.01.005	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan air dan listrik	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan untuk kantor	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.007	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pemenuhan alat dan bahan pembersih	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.008	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang terpenuhi	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan cetakan	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.011	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.012	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan makan dan minum rapat dan tamu	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.014	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan jasa teknis administrasi perkantoran	60		12	9	75		9	15%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.01.018	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honor pengelola keuangan	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.354	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.01.445	Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak	jumlah Kegiatan pameran OPD	5		1	0	0		0	0%
2.02.2.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	100%		100%	75%	75		1	75%
2.02.2.02.01.00.02.062	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor	60		10	6	60		6	10%
2.02.2.02.01.00.02.206	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin dan berkala peralatan gedung kantor	60		12	9	75		9	15%
2.02.2.02.01.00.02.207	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemenuhan pembayaran pajak kendaraan dinas	290		58	45	77,5862069		45	16%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%		100%	0%	0		0	0%
2.02.2.02.01.00.04.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10		2	0	0		0	0%
2.02.2.02.01.00.06	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase penyelesaian dokumen capaian kinerja	100%		100%	0,5	50		1	50%
2.02.2.02.01.00.06.001	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA	20		4	1	25		1	5%
2.02.2.02.01.00.06.006	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen LPPD dan LAKIP	10		2	2	100		2	20%
2.02.2.02.01.00.06.073	Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	penyusunan dokumen anjab, ABK dan Evajab	15		3	3	100		3	20%
2.02.2.02.01.00.07	Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	Persentase pakaian dinas pegawai terpenuhi	100%		100%	100%	100		1	100%



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.07.006	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS	310		62	62	100		62	20%
2.02.2.02.01.00.08	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase tersusunnya dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%		100%	50%	50		1	50%
2.02.2.02.01.00.08.001	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	20		4	2	50		2	10%
2.02.2.02.01.00.10	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase tersusunnya dokumen Profil OPD / Updating data Profil OPD	100%		100%	0%	0		0	0%
2.02.2.02.01.00.10.001	Penyusunan Data dan Profil OPD	Jumlah dokumen profil OPD	5		1	0	0		0	0%
2.02.2.02.01.00.12	Program Peningkatan Sarana Prasarana Peralatan dan Gedung Kantor	Persentase peningkatan sarana prasarana gedung kantor	100%		100%	75%	75		1	75%
2.02.2.02.01.00.12.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional	60		12	9	75		9	15%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.16	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	a) Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%		100%	60%	60		60%	60%
		b) Presentase Forum Anak Daerah yang Aktif	100%		100%	80%	80		80%	80%
2.02.2.02.01.00.16.002	Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak	jumlah anak korban kekerasan yang didampingi	75		15	72	480		72	96%
2.02.2.02.01.00.16.003	Pengembangan Kota Layak Anak	jumlah sekolah yang diberikan sosialisasi tentang kota layak anak	60		12	12	100		12	20%
2.02.2.02.01.00.16.004	Peringatan Hari Anak Nasional, Forum Anak Daerah (FAD) dan Forum Anak Indonesia (FAI)	(1) Jumlah kegiatan peringatan hari anak nasional	5		1	1	100		1	20%
		(2) Jumlah forum anak yang mendapatkan fasilitasi	180		36	36	100		36	20%
2.02.2.02.01.00.16.006	Kampanye Perlindungan Anak	jumlah kegiatan Kampanye Perlindungan Anak	10		2	2	100		2	20%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.16.007	Peningkatan Kapasitas SDM Kader Pendamping Anak	jumlah Kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	250		50	50	100		50	20%
2.02.2.02.01.00.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	a) Persentase Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan Keterampilan dan Keahlian	100%		100%	80%	80		80%	80%
		b) Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%		100%	80%	80		80%	80%
2.02.2.02.01.00.17.001	Pembinaan Dalam Rangka Hari-Hari Besar Kewanitaan (Hari Kartini dan Hari IBU)	Jumlah kegiatan peringatan hari wanita	10		2	1	50		1	10%
2.02.2.02.01.00.17.003	Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan	Jumlah kegiatan pembinaan keterampilan perempuan	30		6	0	0		0	0%
2.02.2.02.01.00.17.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter dan Operasional	penyediaan rumah aman untuk korban kekerasan	60		12	9	75		9	15%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02.2.02.01.00.17.007	Monitoring dan Evaluasi Pokja Penanganan Kasus Trafficking dan Korban KDRT Perempuan dan Anak	Jumlah Pokja dan Gugus Tugas KDRT yang aktif	180		36	18	50		18	10%
2.02.2.02.01.00.17.008	Sosialisasi Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Jumlah forum PUSPA yang terbentuk	1		1	1	100		1	100%
2.02.2.02.01.00.17.009	Pengumpulan basis data perempuan dan anak kota pontianak	Jumlah ketersediaan data perempuan dan anak	10		2	0	0		0	0%
2.02.2.02.01.00.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	100%		100%	100%	100		100%	100%
2.02.2.02.01.00.18.001	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	jumlah OPD yang dilatih PPRG	160		32	0	0		0	0%
JUMLAH			2617	0	523	449,5	85,95			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA							85,95			

**OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak**  
**Urusan : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>									
	<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA</b>									
2.08.2.02.01.00.19	<b>Program Keluarga Berencana</b>	a) Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB Aktif	70,67%		100%	75%	75%		75%	106,13%
		b) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, alat dan obat kontrasepsi	100%						0%	0,00%
2.08.2.02.01.00.19.001	<b>Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan KB</b>	Jumlah peserta MOW dalam pelayanan MOW gratis untuk masyarakat kurang mampu	200		40	30	75%		30	15,00%
2.08.2.02.01.00.19.002	<b>Pengadaan Sarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik)</b>	Jumlah pembangunan / pengadaan sarana pelayanan dan penyuluhan KB	40		11	4	36%		4	10,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.2.02.01.00.19.004	Operasional Pelayanan Keluarga Berencana (BOKB/DAK Non Fisik)	Jumlah pemenuhan Operational Balai Penyuluhan KB	60		12	9	75%		9	15,00%
2.08.2.02.01.00.20	Program Keluarga Sejahtera	a) Prosentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB	87,17%		87,17%	0	0%		0%	0,00%
		b) Prosentase cakupan anggota BKB berkb	82,25%		82,25%	0	0%		0%	0,00%
		c) Persentase kelompok Caturbina KB yang mendapatkan pendampingan	100%		100%	0	0%		0%	0,00%
2.08.2.02.01.00.20.001	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Peserta aktif dalam pembinaan kelompok UPPKS	500		100	25	25%		25	5,00%
2.08.2.02.01.00.20.002	Pembinaan Ketahanan Remaja	Jumlah peserta aktif saka kencana dan PIK R / M	250		50	15	30%		15	6,00%
2.08.2.02.01.00.20.003	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL)	Jumlah Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) yang mendapatkan pembinaan	620		124	50	40%		50	8,06%
2.08.2.02.01.00.21	Program Penyuluhan dan Penggerakan	a) Persentase pencapaian peserta KB baru	78,05%		78,05%	0	0%		0%	0,00%
		b) Presentase Penggunaan MKJP	26,9%		26,9%	0	0%		0%	0,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.2.02.01.00.21.001	Promosi Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Program Pelayan KB	(1) Jumlah Promosi advokasi KKBPK	60		12	9	75%		9	15,00%
		(2) Promosi Pencanaan KB Kes	5		1		0%		0	0,00%
2.08.2.02.01.00.21.002	Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi KKBPK (BOKB/DAK Non Fisik)	Jumlah kampung KB yang mendapatkan dana operasional kampung KB	30		6	5	83%		5	16,67%
2.08.2.02.01.00.22	Program Perencanaan Pengendalian Penduduk	a) Persentase data dan informasi keluarga yang diupdate	100%		100%	75%	75%		75%	75,00%
		b) Presentase cakupan unmet need	13,55%		13,55%	0	0%		0%	0,00%
2.08.2.02.01.00.22.001	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Jumlah kegiatan rakor terkait kebijakan pengendalian penduduk	15		3	0	0%		0	0,00%
2.08.2.02.01.00.22.002	Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan	jumlah data keluarga yang datanya diupdate / dimutakhirkan	5		1	0	0%		0	0,00%
2.08.2.02.01.00.22.003	Monitoring dan Evaluasi Data Unmet Need	Jumlah Evaluasi Data Unmet Need	30		6	0	0%		0	0,00%
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM</b>			<b>1815</b>	<b>0</b>	<b>366</b>					

**OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak**

**Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	13=11/6x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
2.07.2.02.01.00.23	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Partisipasi LPM dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%		100%	75%	75		75%	75%
2.07.2.02.01.00.23.001	Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah terlaksananya kegiatan BBGRM	5		1	0	0		0	0%
2.07.2.02.01.00.23.002	Lomba Pembangunan Kelurahan	jumlah kelurahan yang dibina	5		1	1	100		1	20%
2.07.2.02.01.00.24	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah alat TTG yang dihasilkan	10		2	0	0		0%	0%
2.07.2.02.01.00.24.001	Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna (TTG)	jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG	150		30	0	0		0	0%
2.07.2.02.01.00.24.002	Pusat Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)	Jumlah Posyantek / Kecamatan	10		2	0	0		0	0%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM			170	0	34	1	2,94			



Dari tabel diatas dapat terlihat hampir semua program / kegiatan tidak dapat memenuhi target seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dikarenakan, seperti kita ketahui pada tahun 2020 ini terjadi wabah pandemi dunia yang berdampak pada semua sektor kehidupan. Akibatnya semua kegiatan tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya, karena pemerintah melakukan pembatasan sosial dan melarang aktifitas yang mengumpulkan banyak orang, sehingga banyak kegiatan pada DP2KBP3A Kota Pontianak tidak dapat dilaksanakan. Dan dari segi keuangan terjadi refocusing anggaran, beberapa kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dipindahkan untuk penanganan dan penanggulangan yang terdampak oleh pandemi COVID - 19.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dari table 2.2 dibawah dapat terlihat bahwa kinerja pelayanan PD tergambar pada 12 indikator, sebagian besar indikator sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

TFR (Angka Kelahiran Total) indikator ini tercapai melebihi target yang ditentukan. Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 2,1 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya.

1. Banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15 - 49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya

2. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Pada tahun 2020, capaian PD 70,40% telah melampaui target nasional sebesar 65%.
3. Unmet need *atau* kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi pada tahun 2020 capaian PD sebesar 11,92%, jauh dibawah target nasional sebesar 8,60%. Langkah – langkah kedepan yang akan diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan penjangkaran akseptor KB PUS dan unmet need melalui berbagai metode promosi KB baik melalui media elektronik, jejaring media sosial dan kegiatan pencanangan KB serta penyediaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) bagi masyarakat miskin.
4. Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei. Capaian PD pada tahun 2020 adalah sebesar 25%.
5. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.
6. Angka stunting pada baduta (balita dua tahun) di Kota Pontianak sebesar 14,7. Presiden RI mengamanatkan angka stunting harus di bawah 14 persen jadi memang masih ada sedikit tantangan kita, tetapi angka ini sudah berada pada standar stunting WHO yakni di bawah 20 persen.
7. Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan adalah untuk mengukur seberapa besar keterlibatan LPM yang ada dalam berbagai kegiatan pembangunan yang ada di Kota Pontianak, khususnya di Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Pada tahun

2020 seluruh LPM yang terdaftar di masing – masing kecamatan dan kelurahan terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di kelurahan dan kecamatan

8. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Capaian PD pada tahun 2020 adalah APE kategori Pratama. Untuk mewujudkan capaian kategori yang lebih tinggi strategi yang dilakukan PD adalah memasukkan Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Pontianak, meningkatkan Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi semakin tinggi di Kota Pontianak, sehingga kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki semakin mengecil, menuangkan Perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan melalui Program Pengarusutamaan Gender yang telah dilakukan setiap tahun dan terus di evaluasi untuk meningkatkan pencapaian tujuan.
9. Rasio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 sebesar 0,0021. Langkah kedepan untuk menurunkan rasio kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pencegahan dan pelayanan. Pencegahan meliputi pembentukan kader pencegahan KDRT mulai dari tingkat kelurahan sampai kecamatan, pembentukan forum puspa, melaksanakan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pelatihan keterampilan perempuan. Sedangkan untuk pelayanan, PD memaksimalkan pelayanan di rumah aman untuk menampung perempuan korban kekerasan, memberikan bantuan hukum dan psikolog dan pelayanan pendampingan ke tenaga kesehatan dan hukum bagi korban yang membutuhkan.

10. Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data gender dan anak pada tahun 2020 tercapai 60%. Banyak data sekunder yang dibutuhkan PD untuk updating data gender dan anak, oleh karena itu pelibatan stackholder terkait yang memiliki data menjadi penting untuk pemenuhan data terkait.
11. Forum anak daerah menjadi salah satu tolak ukur suatu daerah dalam pemenuhan Hak –Hak Anak, pada tahun 2020 seluruh kecamatan dan kelurahan telah terbentuk Forum Anak Daerah, dan semua FAD aktif dalam semua kegiatan terkait pembangunan hak – hak anak di daerah.
12. Pada tahun 2020 sebesar 70 kasus anak terdampingi, peningkatan jumlah kasus diakibatkan banyak pengungkapan kasus prostitusi anak yang diungkap oleh pihak kepolisian pada tahun 2020.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DP2KBP3A**  
**Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024**

NO	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
1	TFR (Angka Kelahiran Total)			2,17	2,39	2,21	2,19	2,1	1.87%		2,21	2,19	
2	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			546	549	400	350	325	549		400	350	
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			70,23%	70,48%	70,52%	70,61%	70,72%	70.40%		70,52%	70,61%	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			12,14%	12,47%	8%	7,70%	7,40%	11.93%		8%	7,70%	
5	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			0%	19%	20,9%	21,0%	21,0%	25,00%		20,9%	21,0%	
6	Persentase Baduta Stunting			0	24,50%	24%	22%	19%	-		24%	22%	

NO	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
7	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan			0	55%	60%	75%	90%	100%		60%	75%	
8	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)			Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Pratama		Madya	Madya	
9	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			0,0037	0,0038	0,0036	0,0033	0,0031	0,0021		0,0036	0,0033	
10	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak			60%	65%	75%	90%	100%	80%		75%	90%	
11	Persentase Forum Anak Daerah Aktif			100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
12	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa faktor yang menyebabkan belum semua target-target indikator kinerja sasaran strategis (*outcome*) dan target kinerja kegiatan (*output*) yang direncanakan dapat direalisasikan belum optimal disebabkan oleh beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

- a. Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang baik dan memadai sehingga data dan informasi yang digunakan untuk merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan tidak tercapai secara optimal.
- b. Kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang masih rendah, keterbatasan sumberdaya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia sehingga pelayanan prima belum menjangkau dan memberikan kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- c. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik di internal Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun antar SKPD terkait serta dengan pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang masih perlu ditingkatkan lagi secara terpadu dan berkelanjutan.
- d. Kurangnya peran dan sinergitas diantara para pihak (stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan/atau kesenjangan kegiatan sehingga tidak efektif dan efisien. Hal ini juga berakibat pada sulitnya menciptakan komitmen bersama dalam mengembangkan potensi swadaya secara optimal yang bermuara pada kurang optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. Lemahnya kekuatan modal sosial (social capital) seperti kepercayaan, kebersamaan, partisipasi, jejaring masyarakat yang menyebabkan terhambatnya pengembangan potensi masyarakat, kurangnya kreativitas atau swadaya masyarakat dalam memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dalam bidang inovasi pembangunan rendahnya posisi

tawar masyarakat, dan tidak efektifnya berbagai program dan kegiatan yang direncanakan.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mengupayakan berbagai langkah kebijakan yaitu :

- a. Peningkatan hubungan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi terkait dalam wilayah kerja seperti Kecamatan, Kelurahan, SKPD, BKKBN, Kepolisian, TNI serta komponen masyarakat lainnya seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, LSM, LPM, Pekerja Sosial, Pihak Swasta, PKK, LPM, BKM, dan lainnya.
- b. Membangun sistem perencanaan kinerja yang lebih terarah dan difahami oleh semua pemangku program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB, sehingga pada saatnya pelaksanaan dan pelaporan atas terlaksananya program dan kegiatan dapat disampaikan secara akurat dan akuntabel.
- c. Peningkatan partisipasi stakeholders dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana.
- d. Perluasan pembinaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui berbagai kebijakan dan strategi yang bersifat terpadu dan terkoordinas dengan berbagai stakeholder;
- e. Pembenahan internal organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.



## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pontianak RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel rancangan awal RKPD 2022 :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kota Pontianak

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kota Pontianak**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.644.245.887				7.845.917.270	
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.727.598.167		7.010.823.751	5.535.018.167			Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	95%	7.010.823.751
2	08	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		24 dokumen	19.851.316			Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	24 dokumen	21.836.447
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 dokumen	5.268.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	14 dokumen	5.795.295
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 laporan	13.739.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 laporan	15.112.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	843.866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	928.252
2	08	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		12 bulan	4.782.685.780			Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	6.119.657.353
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	4.394.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	5.693.180.996
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	382.023.279	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	420.225.606
2	8	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5.682.501	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	6.250.751
2	08	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		31 ASN	56.671.560			Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	31 ASN	62.338.716
2	8	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 stel	40.336.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	64 stel	44.370.216

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	8	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 ASN	16.335.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	2 ASN	17.968.500
2	08	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		12 bulan	447.161.541			Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	486.640.468
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5.445.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	5.989.500
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 unit	70.567.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 unit	77.623.920
2	8	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 unit	13.068.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	100 unit	14.374.800
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	56.469.006	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	62.115.906
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	3.920.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	4.312.440

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 orang	58.669.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah tamu yang difasilitasi	400 orang	64.536.862
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	239.022.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	257.687.040
2	08	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 unit	96.570.570			Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit	73.227.627
2	8	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 unit	96.570.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	15 unit	73.227.627
2	08	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 bulan	33.864.600			Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	37.251.060
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	10.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	11.616.000
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	23.304.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	25.635.060

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		135 unit	290.792.800			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	135 unit	209.872.080
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 unit	227.413.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	58 unit	140.154.300
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 unit	63.379.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	65 unit	69.717.780
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		Madya	201.632.328			Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Madya	221.795.561
2	08	002	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		11,56%	39.844.200			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	11,56%	43.828.620
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 program	17.844.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	60 program	19.628.620
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 lembaga	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	20 lembaga	24.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	002	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi		100,00%	90.305.728			persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100,00%	99.336.301
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 peserta	90.305.728	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	800 peserta	99.336.301
2	08	002	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		2	71.482.400			Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2	78.630.640
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 lembaga	71.482.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	3 lembaga	78.630.640
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,0036	352.864.549			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0036	252.045.804
2	08	003	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		100%	43.895.670			Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	22.180.037
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 rakor	9.129.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	5 rakor	10.042.758

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kebijakan/program	34.765.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 kebijakan/program	12.137.279
2	08	003	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		3	308.968.879			Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3	229.865.767
						Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan		20%				Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	20%	
2	8	3	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	284.678.679	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan	12 bulan	203.146.547
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 kader	24.290.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	60 kader	26.719.220
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak		75%	48.030.993			Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	75%	15.720.320



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	005	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirkan		100%	48.030.993			Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirkan	100%	15.720.320
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data Gender dan Anak yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 data	48.030.993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah data Gender dan Anak yang tersedia	2 data	15.720.320
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif		100%	212.948.010			Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%	234.242.810
2	08	006	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		35%	25.669.325			Persentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	35%	28.236.257
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 lembaga	25.669.325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	20 lembaga	28.236.257
2	08	006	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan		20%	187.278.685			Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	20%	206.006.553

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 media massa	76.940.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5 media massa	84.634.176
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 lembaga	110.338.525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 lembaga	121.372.377
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota		100%	101.171.840			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100%	111.289.024
2	08	007	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		100%	40.506.290			Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	44.556.919
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak mendapat mendampingan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 kasus	40.506.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kasus anak mendapat mendampingan	70 kasus	44.556.919
2	08	007	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan		20%	60.665.550			Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	20%	66.732.105

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 peserta	60.665.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah peserta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	50 peserta	66.732.105
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.468.039.000					1.514.842.900
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan		60%	1.468.039.000			Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	60%	1.514.842.900
2	13	005	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan		60%	<b>368.039.000</b>			persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan	60%	<b>414.842.900</b>
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurarahen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kelurahan	149.844.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurarahen	1 kelurahan	174.828.510
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 peserta	118.194.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG	40 peserta	140.014.390

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Jumlah Posyantek yang terbentuk		2 posyantek			Jumlah Posyantek yang terbentuk	2 posyantek			
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah stackholder yang terlibat dalam kegiatan BBGRM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 stackholder	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah stackholder yang terlibat dalam kegiatan BBGRM	38 stackholder	100.000.000
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	fasilitasi tim penggerak PKK		36 Kelompok	1.100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36 Kelompok	1.100.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.457.195.113					3.575.475.244
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,21	277.176.390			TFR (Angka Kelahiran Total)	2,21	310.763.449
						Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		400				Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	400	
2	14	002	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk		80%	155.116.390			Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	80%	184.303.449

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	2	2.01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		46 stackholder	53.446.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	46 stackholder	58.791.480
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Perda	41.014.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1 Perda	58.791.480
2	14	2	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah data keluarga yang dimutakhirkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 data	60.654.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah data keluarga yang dimutakhirkan	1 data	66.720.489
2	14	002	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		80%	122.060.000			persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	80%	126.460.000
2	14	2	2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data yang dibentuk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 rumah data	78.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah rumah data yang dibentuk	2 rumah data	78.060.000
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 data	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola	1 data	24.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 data	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola	30 data	24.200.000
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		70,52%	2.850.876.019			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,52%	2.902.654.821
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		8%				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8%	
2	14	003	2.01		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		86,20%	<b>1.306.675.600</b>			Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	86,20%	<b>1.349.946.360</b>
						Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		28,30%				Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28,30%	
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		1 Pokja	75.587.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1 Pokja	83.146.360
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik		4 promosi	88.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	4 promosi	96.800.000
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 kegiatan	600.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 kegiatan	770.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 balai penyuluhan KB	543.088.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana	6 balai penyuluhan KB	400.000.000
2	14	003	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		100%	1.544.200.419			Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	1.552.708.461
						Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		45,12%				Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	45,12%	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 faskes	31.346.019	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB	95 faskes	34.480.621
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS yang menggunakan MKJP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19900 PUS	160.120.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PUS yang menggunakan MKJP	19900 PUS	176.132.440
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 paket	1.190.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	9 paket	1.163.088.000
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 peserta	107.734.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	60 peserta	118.507.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 peserta	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	60 peserta	60.500.000
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		20,9%	329.142.704			Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,9%	362.056.974
						Persentase Baduta Stunting		24%				Persentase Baduta Stunting	24%	
2	14	004	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		60,32	307.142.704			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,32	337.856.974
2	14	4	2.01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK/R, UPPKS) yang dibentuk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 kelompok	41.689.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK/R, UPPKS) yang dibentuk	10 kelompok	45.858.879
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 paket	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 paket	60.500.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 peserta	85.953.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50 peserta	94.549.158
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105 kader	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kader yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	105 kader	36.300.000
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan kader Poktan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 pengelola/kader	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan kader Poktan	50 pengelola/kader	24.200.000
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya biaya operasional kelompok untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelompok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 kelompok	25.499.034	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya biaya operasional kelompok untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelompok	12 kelompok	28.048.937
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kegiatan	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 kegiatan	24.200.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
													Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kegiatan	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	3 kegiatan	24.200.000	
2	14	004	2.02		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Persentase keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		65%	<b>22.000.000</b>			Persentase keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	65%	<b>24.200.000</b>	
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 kegiatan	24.200.000	
TOTAL										11.569.480.000				12.936.235.414	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat dapat diutaran secara langsung secara buttom up mulai dari kelurahan sampai kecamatan menggunakan sistem SIPD yang telah berjalan di Pemerintahan Kota Pontianak. Berikut beberapa usulan program kegiatan yang tertampung pada DP2KBP3A Kota Pontianak :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pelatihan menjadi orang tua hebat	Jl. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung III RT. 3 / RW. 22, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir		Rekomendasi : Prioritas Koefisien : 1 paket Anggaran : 20000000	Modal Fisik dan Materi Pelatihan ibu hebat
2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	GG. SRIKAYA 2 RT.04/RW.07, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaiawi Luar		Rekomendasi : ok Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	PELATIHAN KADER POSYANDU
3	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Posyandu Kelurahan BBL, Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut		Rekomendasi : dapat dipertimbangkan Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000	Posyandu Kelurahan BBL (150.000.000)
4	Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	RW.007, RW.011, Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut		Rekomendasi : dapat dipertimbangkan Koefisien : 2 kelompok Anggaran : 12000000	Daerah Rawan TPPO dan Prostitusi, 2 Kelompok (Rp.12.000.000)
5	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Kelurahan Banjar Serasan, Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan		Rekomendasi : dipertimbangkan Koefisien : 1 paket Anggaran : 3000000	Dalam rangka memberdayakan ibu ibu, maka dipandang perlu adanya pelatihan pengolahan pangan berbasis pangan lokal
6	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS Kelurahan Banjar Serasan, Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan		Rekomendasi : dipertimbangkan Koefisien : 1 paket Anggaran : 3000000	Perlu adanya pelatihan untuk kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS
7	Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak (PHA)	forum anak kelurahan, Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan		Rekomendasi : dipertimbangkan Koefisien : 1 paket Anggaran : 2000000	forum anak kelurahan memerlukan sosialisasi pemenuhan hak anak
8	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Gg. Alpokat Permai, Gg. Alpokat Jaya, Gg. Alpokat Raya (RW. 015), Kota Pontianak,		Rekomendasi : ok Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Pelatihan tata boga dan pelatihan kecantikan di RW. 015

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Pontianak Barat, Sungaibeliung			
9	Pelatihan Keterampilan Perempuan	GG. Sriwijaya VI No.94 RT.01 RW.011, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung		Rekomendasi : ok Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Usaha Kecantikan dan Salon
10	Pelatihan Keterampilan Perempuan	RW.016, Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru		Rekomendasi : sudah di rekomendasikan sebagai usulan prioritas Kecamatan Pontianak Selatan Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Meningkatkan keterampilan untuk warga yang tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi / kuliah
11	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Anggota PKK Kel Bansir Laut, Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut		Rekomendasi : menginput data usulan musrenbang kecamatan pada dinas Koefisien : 17 orang Anggaran : 30000000	Anggota PKK Kel Bansir Laut membutuhkan penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (PKB, PKR, BKL, TPPKS, PIKR, dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS) dengan volume 17 orang dan memiliki Pagu Rp 30.000.000
12	Pelatihan Keterampilan Perempuan	PKK Kel Bansir Laut, Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut		Rekomendasi : dapat dipertimbangkan Koefisien : 17 orang Anggaran : 17000000	Anggota PKK Kel Bansir Laut membutuhkan pelatihan keterampilan perempuan seperti melipat barang antaran pengantin dan membuat tas dari tali kur dengan volume 17 orang dan memiliki Pagu sebesar Rp. 17.000.000
13	Pelatihan kader Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Jl. Prof. M Yamin Gg. Sinar Bersama RT.003/RW.009, Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru		Rekomendasi : sudah di rekomendasikan sebagai usulan prioritas Kecamatan Pontianak Selatan Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Peningkatam kualitas warga yang berbakat
14	Pelatihan Keterampilan Perempuan	KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar		Rekomendasi : ok Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	PELATIHAN FARDHU KIFAYAH
15	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Komplek Dwi Ratna Indah 3 RT. 02/ RW. 05, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima		Rekomendasi : ok Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	keterampilan Membuat kue
16	Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan Tanjung Hilir, Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir		Rekomendasi : dipertimbangkan Koefisien : 1 paket Anggaran : 2000000	Pembinaan/pelatihan PHBS
17	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Komp. Bali Indah RT. 005/RW. 006, Kota Pontianak,		Rekomendasi : ok Koefisien : 1 paket	Pemberdayaan PKK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pontianak Barat, Sungaibeliung		Anggaran : 0	
18	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Jl. Tanjung Raya II, RW. 01 Sampai RW. 08, Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor		Rekomendasi : dipertimbangkan Koefisien : 1 paket Anggaran : 3000000	Pelatihan kewirausahaan ( IT dan Keuangan Keluarga ) untuk PKK dan Dasawisma.
19	Peningkatan kapasitas kader dan jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jln. Khatulistiwa Km. 4,5, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang		Rekomendasi : Prioritas Koefisien : 1 paket Anggaran : 30000000	Pembentukan dan pelatihan kader pendamping anak di setiap RW
20	Pembentukan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jln. Khatulistiwa Km. 4,5, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang		Rekomendasi : Prioritas Koefisien : 1 paket Anggaran : 30000000	Operasional dan pembentukan pemantauan Orang Dalam Gangguan Jiwa terintegrasi dengan pihak dinas sosial dan puskesmas
21	Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak (PHA)	forum anak kelurahan pallima, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima		Rekomendasi : ok Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	sosialisasi pemenuhan hak anak dan aturan perlindungan pada keluarga dan orang tua
22	Pelatihan Keterampilan Perempuan	RW 04, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam		Rekomendasi : ok Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Memberdayakan masyarakat untuk keterampilan menganyam
23	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Gg Tri Dharma Laut RT. 7/RW 25, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung		Rekomendasi : ok Koefisien : 1 paket Anggaran : 0	Pelatihan Anyaman
24	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Gg Karya Tani Jalur V RT. 05/RW 25, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung			keterampilan untuk ibu2 dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan keluarga 50 orang

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

**A** nalisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel berikut ini.

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> </ul>		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li> <li>Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Munculnya berbagai tindak</li> </ul>		

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	kekerasan terhadap anak	anak	
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut : **“Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”** dengan sasaran :

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak
2. Meningkatnya Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2020 - 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun ke-2019	Tahun ke-2020	Tahun ke-2021	Tahun ke-2022	Tahun ke-2023	Tahun ke-2024	
1	Meningkatkan	a. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Persentase Laju pertumbuhan Penduduk	%	1,71	1,71	1,65	1,51	1,23	1,11	1,11
	Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan	b. Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	%	93,50	93,88	93,92	93,98	94,05	94,17	94,17
	Perlindungan Anak	c. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Kategori	ratama	ratama	Pratama	Madya	Nindya	Utama	Utama

### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diimplementasikan sesuai dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang selaras dengan RPJM Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk



- 1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
- 2) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- 3) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
  - 1) Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
  - 2) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
  - 3) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
  - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
    - 1) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
    - 2) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
    - 3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

- 4) Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
- b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - 3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  - 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
  - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    - 1) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) ,Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) ,Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
    - 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

### Keluarga/UPPKS)

- 3) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 4) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 5) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 6) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 7) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 8) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
      - 1) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
- 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
  - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
    - 2) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
    - 3) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 5. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
  - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
    - 2) Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
  - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan

#### Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### 6. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### 7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data

Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah  
Kabupaten/kota

- 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di  
Kewenangan Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Tabel 3.3

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DP2KBP3A Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Pontianak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.644.245.88 7				7.845.917.27 0	
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.535.018.167		95%	5.535.018.16 7			Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	95%	7.010.823.75 1
2	0 8	00 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		24 dokumen	19.851.316			Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	24 dokumen	21.836.447
2	8	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 dokumen	5.268.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	14 dokumen	5.795.295
2	8	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 laporan	13.739.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 laporan	15.112.900
2	8	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	843.866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	928.252

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	0	00	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		12 bulan	4.782.685.78 0			Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	6.119.657.35 3
2	8	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	4.394.980.00 0	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	5.693.180.99 6
							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
2	8	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	382.023.279	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	420.225.606
2	8	1	2.0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5.682.501	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	6.250.751
2	0	00	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		31 ASN	56.671.560			Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	31 ASN	62.338.716
2	8	1	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 stel	40.336.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	64 stel	44.370.216

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
2	8	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 ASN	16.335.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	2 ASN	17.968.500
2	0 8	00 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		12 bulan	447.161.541			Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	486.640.468
2	8	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5.445.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	5.989.500
2	8	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 unit	70.567.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 unit	77.623.920
2	8	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 unit	13.068.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	100 unit	14.374.800
2	8	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	56.469.006	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	62.115.906
2	8	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	3.920.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	4.312.440

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
2	8	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 orang	58.669.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah tamu yang difasilitasi	400 orang	64.536.862
2	8	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	239.022.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	257.687.040
2	0 8	00 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 unit	96.570.570			Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 unit	73.227.627
2	8	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 unit	96.570.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	15 unit	73.227.627
2	0 8	00 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 bulan	33.864.600			Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	37.251.060
2	8	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	10.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	11.616.000
2	8	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	23.304.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	25.635.060

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
2	0	00	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		135 unit	290.792.800			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	135 unit	209.872.080
2	8	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 unit	227.413.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	58 unit	140.154.300
2	8	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 unit	63.379.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	65 unit	69.717.780
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		Madya	201.632.328			Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Madya	221.795.561
2	0	00	2.0		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		11,56%	39.844.200			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	11,56%	43.828.620
2	8	2	2.0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 program	17.844.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	60 program	19.628.620

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
2	8	2	2.0 1	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 lembaga	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	20 lembaga	24.200.000
2	0 8	00 2	2.0 2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi		100,00%	90.305.728			persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100,00%	99.336.301
2	8	2	2.0 2	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 peserta	90.305.728	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	800 peserta	99.336.301
2	0 8	00 2	2.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		2	71.482.400			Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2	78.630.640
2	8	2	2.0 3	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 lembaga	71.482.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	3 lembaga	78.630.640

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,0036	352.864.549			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0036	252.045.804
2	0 8	00 3	2.0 1		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		100%	43.895.670			Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	22.180.037
2	8	3	2.0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 rakor	9.129.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	5 rakor	10.042.758
2	8	3	2.0 1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kebijakan/progra m	34.765.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 kebijakan/progra m	12.137.279
2	0 8	00 3	2.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		3	308.968.879			Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3	229.865.767

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan		20%				Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	20%	
2	8	3	2.0 3	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	284.678.679	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan	12 bulan	203.146.547
2	8	3	2.0 3	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 kader	24.290.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	60 kader	26.719.220
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak		75%	48.030.993			Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	75%	15.720.320
2	0 8	00 5	2.0 1		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirkan		100%	<b>48.030.993</b>			Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirkan	100%	<b>15.720.320</b>



Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
2	8	5	2.0 1	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data Gender dan Anak yang tersedia	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 data	48.030.993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah data Gender dan Anak yang tersedia	2 data	15.720.320
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif		100%	212.948.010			Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%	234.242.810
2	0 8	00 6	2.0 1		<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		35%	<b>25.669.325</b>			Persentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	35%	<b>28.236.257</b>
2	8	6	2.0 1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 lembaga	25.669.325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	20 lembaga	28.236.257
2	0 8	00 6	2.0 2		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan		20%	<b>187.278.685</b>			Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	20%	<b>206.006.553</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
2	8	6	2.0 2	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 media massa	76.940.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5 media massa	84.634.176
2	8	6	2.0 2	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 lembaga	110.338.525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 lembaga	121.372.377
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota		100%	101.171.840			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100%	111.289.024
2	0 8	00 7	2.0 2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		100%	40.506.290			Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	44.556.919

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
2	8	7	2.0 2	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak mendapat mendampingan	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 kasus	40.506.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kasus anak mendapat mendampingan	70 kasus	44.556.919
2	0 8	00 7	2.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan		20%	60.665.550			Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	20%	66.732.105
2	8	7	2.0 3	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 peserta	60.665.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah peserta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	50 peserta	66.732.105
2	1 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.468.039.00 0					1.514.842.90 0
2	1 3	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan		60%	1.468.039.00 0			Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	60%	1.514.842.90 0

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
2	1	00	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan		60%	368.039.000			persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan	60%	414.842.900
2	1	5	2.0	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kelurahan	149.844.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurahan	1 kelurahan	174.828.510
2	1	5	2.0	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 peserta	118.194.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG	40 peserta	140.014.390
	3		1		Jumlah Posyantek yang terbentuk			2 posyantek				Jumlah Posyantek yang terbentuk	2 posyantek	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
												Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	1	5	2.0	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah stackholder yang terlibat dalam kegiatan BBGRM	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 stackholder	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah stackholder yang terlibat dalam kegiatan BBGRM	38 stackholder	100.000.000
2	1	5	2.0	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	fasilitasi tim penggerak PKK	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Kelompok	1.100.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		asilitasi tim penggerak PKK	36 Kelompok	1.100.000.000
2	1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.457.195.113					3.575.475.244
2	1	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,21	277.176.390			TFR (Angka Kelahiran Total)	2,21	310.763.449
						Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		400				Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	400	
2	1	00	2.0		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk		80%	155.116.390			Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	80%	184.303.449

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
2	1 4	2	2.0 1	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah stakeholders/pemang ku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		46 stackholder	53.446.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah stakeholders/pemang ku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	46 stackholder	58.791.480
2	1 4	2	2.0 1	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Perda	41.014.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1 Perda	58.791.480
2	1 4	2	2.0 1	1 4	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah data keluarga yang dimutakhirkan	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 data	60.654.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah data keluarga yang dimutakhirkan	1 data	66.720.489
2	1 4	00 2	2.0 2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		80%	122.060.000			persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	80%	126.460.000
2	1 4	2	2.0 2	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data yang dibentuk	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 rumah data	78.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah rumah data yang dibentuk	2 rumah data	78.060.000

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Tolok Ukur	Target		
2	1	2	2.0	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 data	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola	1 data	24.200.000
2	1	2	2.0	1	3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 data	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola	30 data	24.200.000
2	1	3				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		70,52%	2.850.876.019			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,52%	2.902.654.821
							Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		8%				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8%	
2	1	00	2.0			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		86,20%	1.306.675.600			Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	86,20%	1.349.946.360
							Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		28,30%				Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28,30%	

Kode						Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
2	1	3	2.0	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Pokja	75.587.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1 Pokja	83.146.360	
2	1	3	2.0	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 promosi	88.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	4 promosi	96.800.000	
2	1	3	2.0	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 kegiatan	600.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 kegiatan	770.000.000	
2	1	3	2.0	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 balai penyuluhan KB	543.088.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana	6 balai penyuluhan KB	400.000.000	
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					



Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Tolok Ukur	Target		
2	1 4	00 3	2.0 3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		100%	1.544.200.41 9			Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	1.552.708.46 1	
						Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		45,12%					Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	45,12%	
2	1 4	3	2.0 3	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat- Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 faskes	31.346.019	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat- Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB	95 faskes	34.480.621	
2	1 4	3	2.0 3	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS yang menggunakan MKJP		19900 PUS	160.120.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah PUS yang menggunakan MKJP	19900 PUS	176.132.440	
2	1 4	3	2.0 3	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB		9 paket	1.190.000.00 0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	9 paket	1.163.088.00 0	
2	1 4	3	2.0 3	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 peserta	107.734.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	60 peserta	118.507.400	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
2	1	3	2.0	1	0	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 peserta	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	60 peserta	60.500.000
2	1	4				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		20,9%	329.142.704			Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,9%	362.056.974
							Persentase Baduta Stunting		24%				Persentase Baduta Stunting	24%	
2	1	00	2.0			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		60,32	307.142.704			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,32	337.856.974

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
2	1	4	2.0	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK/R, UPPKS) yang dibentuk	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 kelompok	41.689.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK/R, UPPKS) yang dibentuk	10 kelompok	45.858.879
2	1	4	2.0	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 paket	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 paket	60.500.000
2	1	4	2.0	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 peserta	85.953.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50 peserta	94.549.158

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
2	1 4	4	2.0 1	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105 kader	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kader yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	105 kader	36.300.000
2	1 4	4	2.0 1	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan kader Poktan	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 pengelola/kader	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan kader Poktan	50 pengelola/kader	24.200.000
2	1 4	4	2.0 1	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya biaya operasional kelompok untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelompok	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 kelompok	25.499.034	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya biaya operasional kelompok untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelompok	12 kelompok	28.048.937

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
2	1	4	2.0	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kegiatan	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 kegiatan	24.200.000	
2	1	4	2.0	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kegiatan	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	3 kegiatan	24.200.000	
2	1	00	2.0		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Persentase keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		65%	<b>22.000.000</b>			Persentase keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	65%	<b>24.200.000</b>	
2	1	4	2.0	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 kegiatan	24.200.000	
TOTAL									11.569.480.0				12.936.235.4		

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
								Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					00				14	

#### **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**R**encana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak dalam kurun waktu tahun 2022.

Berpedoman pada RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum OPD Kota, maka ditetapkan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2022 yang terdiri dari 10 (sepuluh) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 10.276.900.000,-. Dengan demikian ditetapkan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**RANCANGAN RENJA DP2KBP3A 2022**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Rencana Tahun 2022				Cat atan Pen ting	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana/Pa gu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					6.451.665.887		
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		95%	5.535.018.167			
2	08	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		24 dokumen	19.851.316			
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 dokumen	5.268.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 laporan	13.739.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	843.866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		



2	08	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		12 bulan	4.590.105.780		
										PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	4.202.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	382.023.279	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5.682.501	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian		31 ASN	56.671.560		
2	8	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64 stel	40.336.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 ASN	16.335.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat		12 bulan	447.161.541		

						daerah					
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5.445.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 unit	70.567.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 unit	13.068.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	56.469.006	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	3.920.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 orang	58.669.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	239.022.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	001	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 unit</b>	<b>96.570.570</b>		
2	8	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 unit	96.570.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	001	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>33.864.600</b>		
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	10.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	23.304.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	001	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>		<b>135 unit</b>	<b>290.792.800</b>		

2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 unit	227.413.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 unit	63.379.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	2			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		Madya	201.632.328		
2	08	002	2.01		<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</b>		11,56%	39.844.200		
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 program	17.844.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 lembaga	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	08	002	2.02		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi		100,00%	<b>90.305.728</b>		
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 peserta	90.305.728	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	002	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		2	<b>71.482.400</b>		
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 lembaga	71.482.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0,0036	352.864.549		

2	08	003	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		100%	<b>43.895.670</b>		
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 rakor	9.129.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kebijakan/program	34.765.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	003	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		3	<b>308.968.879</b>		
						Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan		20%			

2	8	3	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	284.678.679	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 kader	24.290.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak		75%	48.030.993		
2	08	005	2.01		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirkan		100%	<b>48.030.993</b>		
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data Gender dan Anak yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 data	48.030.993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif		100%	212.948.010		

2	08	006	2.01		<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		35%	<b>25.669.325</b>		
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 lembaga	25.669.325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	006	2.02		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan		20%	<b>187.278.685</b>		
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 media massa	76.940.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	



2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 lembaga	110.338.525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota		100%	101.171.840		
2	08	007	2.02		<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		100%	<b>40.506.290</b>		
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak mendapat mendampingan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 kasus	40.506.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	08	007	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan		20%	<b>60.665.550</b>		

2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 peserta	60.665.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				368.039.000		
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan		60%	368.039.000		
2	13	005	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan		60%	<b>368.039.000</b>		

2	1 3	5	2. 01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelurahan yang dibangun dalam lomba kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kelurahan	149.844.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 3	5	2. 01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 peserta	118.194.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
				Jumlah Posyantek yang terbentuk		2 posyantek					
2	1 3	5	2. 01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah stackholder yang terlibat dalam kegiatan BBGRM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 stackholder	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.457.195.113		
2	1 4	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,21	277.176.390		
						Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		400			

2	1 4	0 0 2	2. 01		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk		80%	<b>155.116.390</b>		
2	1 4	2	2. 01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		46 stakeholder	53.446.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 4	2	2. 01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Perda	41.014.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 4	2	2. 01	1 4	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah data keluarga yang dimutakhirkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 data	60.654.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	14	002	2.02		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		80%	<b>122.060.000</b>		
2	14	2	2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data yang dibentuk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 rumah data	78.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 data	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 data	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		70,52%	2.850.876.019		
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		8%			

2	1 4	0 0 3	2. 01		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		86,20%	<b>1.306.675.600</b>		
						Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		28,30%			
2	1 4	3	2. 01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Pokja	75.587.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 4	3	2. 01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 promosi	88.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 4	3	2. 01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 kegiatan	600.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1 4	3	2. 01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 balai penyuluhan KB	543.088.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

						dan sarana	Semua Keluraha n			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1 4	0 0 3	2. 03		<b>Pengendalia n dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaa n Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		100%	<b>1.544.20 0.419</b>		
						Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		45,12%			
2	1 4	3	2. 03	1	Pengendalia n Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB	Semua Kabupat en/Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	95 faskes	31.346.0 19	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
2	1 4	3	2. 03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS yang menggunaka n MKJP	Semua Kabupat en/Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	19900 PUS	160.120. 400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	1 4	3	2. 03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	Semua Kabupat en/Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	9 paket	1.190.00 0.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	

2	1 4	3	2. 03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 peserta	107.734.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 4	3	2. 03	1 0	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 peserta	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 4	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		20,9%	329.142.704		
						Persentase Baduta Stunting		24%			
2	1 4	0 0 4	2. 01		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		60,32	<b>307.142.704</b>		



2	1 4	4	2. 01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK/R, UPPKS) yang dibentuk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 kelompok	41.689.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 4	4	2. 01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 paket	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 4	4	2. 01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 peserta	85.953.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	1 4	4	2. 01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UP PKS)	Jumlah Kader yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105 kader	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 4	4	2. 01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UP PKS)	Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan kader Poktan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 pengelola/kader	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 4	4	2. 01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UP PKS)	Tersedianya biaya operasional kelompok untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelompok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 kelompok	25.499.034	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 4	4	2. 01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UP PKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kegiatan	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

					PKS)						
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kegiatan	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	14	4	2.01	8	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	Persentase keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		65%	<b>22.000.000</b>		
					Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan bagi Mitra Kerja	Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL									10.276.900.000		

## BAB V

### PENUTUP

**R**encana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

WALIKOTA PONTIANAK,

**EDI RUSDI KAMTONO**